

## **LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2022**

### **A. Ringkasan Laporan**

Pemohon informasi berjumlah 1867 (seribu delapan ratus enam puluh tujuh) orang. Dengan perincian sebagai berikut: Pemohon informasi di bulan Januari sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) orang, bulan Februari sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) orang, bulan Maret sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) orang, bulan April sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) orang, bulan Mei sebanyak 113 (seratus tiga belas) orang, bulan Juni sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) orang, bulan Juli sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) orang, bulan Agustus sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam) orang, bulan September sebanyak 104 (seratus empat) orang, bulan Oktober sebanyak 70 (tujuh puluh) orang, bulan November sebanyak 223 (dua ratus dua puluh tiga) orang, dan bulan Desember sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) orang. Pemohon informasi terdiri dari masyarakat, mahasiswa, LSM, advokat, badan hukum dan wartawan.

### **B. Gambaran Umum Pelayanan Informasi**

#### **1. Sarana dan Prasarana**

Mahkamah Agung memiliki sarana Meja Informasi, Formulir Informasi, 1 (satu) unit Windows PC Petugas, 1 (satu) unit Windows PC Layanan Disabilitas, 4 (empat) unit iMac, 1 (satu) unit Printer, dan Telepon yang berada di gedung Blok F dengan nomor telp. (021)-383348, 3810350, 345766 Ext 2868. Fax (021)-3810361.

Pemanfaatan IT dapat dilihat melalui *website* Mahkamah Agung yang menampilkan informasi sebagai berikut:

- a. Tampilan Berita
- b. Tampilan Perkara
- c. Tampilan Putusan
- d. Tampilan Artikel
- e. Tampilan mengenai agenda yang sedang berjalan,
- f. Profil Mahkamah Agung,
- g. Profil Pimpinan
- h. Profil Pustaka
- i. Kesekretariatan
- j. Layanan Informasi
- k. Pembaharuan Peradilan
- l. Alamat Kantor Mahkamah Agung
- m. Aplikasi Eksternal:
  - Aplikasi Pengaduan (<https://siwas.mahkamahagung.go.id>)
  - Aplikasi Perpustakaan (<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>)
  - Aplikasi LPSE (<https://lpse.mahkamahagung.go.id>)
  - Aplikasi Perkara (<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/>)
  - Aplikasi Putusan (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>)
  - Aplikasi JDIH (<https://jdih.mahkamahagung.go.id>)

- Aplikasi Lelang Jabatan (<http://pejabatonline.mahkamahagung.go.id>)
  - Aplikasi E-Court (<https://ecourt.mahkamahagung.go.id>)
  - Aplikasi SIPP Banding (<https://banding.mahkamahagung.go.id>)
  - Aplikasi EPPID (<https://eppid.mahkamahagung.go.id/web/beranda>)
  - Aplikasi e-LHKPN (<https://elhkpn.kpk.go.id>)
  - Aplikasi SiRUP (<https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/penyedia/kldi/L40>)
  - Aplikasi e-Berpadu (<https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/>)
- n. Aplikasi Internal:
- Aplikasi SIPP (<https://sipp-ma.mahkamahagung.go.id>)
  - Aplikasi KOMDANAS (<https://komdanas.mahkamahagung.go.id>)
  - Aplikasi SIMARI (<https://simari.mahkamahagung.go.id>)
  - Aplikasi SIKEP (<https://sikep.mahkamahagung.go.id>)
  - Aplikasi E-Mail (<https://vmail.mahkamahagung.go.id> & <https://mail.mahkamahagung.go.id>)
  - Aplikasi E-Learning (<https://e-learning.mahkamahagung.go.id>)
  - Aplikasi SAKIP (<https://www.mahkamahagung.go.id/id/sakip/>)
  - Aplikasi e-SADEWA (<https://e-sadewa.mahkamahagung.go.id>)
  - Aplikasi e-BIMA (<https://e-bima.mahkamahagung.go.id>)
  - Aplikasi Website Monitoring (<https://www.mahkamahagung.go.id/id/webmon>)
  - Aplikasi e-Prima (<https://e-prima.mahkamahagung.go.id/landing>)
  - Aplikasi PNBPN (<https://pnbp.mahkamahagung.go.id/>)

## 2. Sumber Daya Manusia

Pelaksana pelayanan informasi di Mahkamah Agung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, terdiri dari:

- 1) Dewan Pertimbangan dijabat oleh Panitera Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, dan Kepala Badan Pengawasan.
- 2) Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris Mahkamah Agung.
- 3) PPID dijabat oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
- 4) PPID Pelaksana dijabat oleh:
  - a. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung;

- b. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung;
  - c. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung;
  - d. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung;
  - e. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung;
  - f. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
  - g. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
  - h. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
  - i. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
  - j. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
  - k. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
  - l. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
  - m. Panitera Muda Perkara Pidana Kepaniteraan Mahkamah Agung;
  - n. Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Kepaniteraan Mahkamah Agung;
  - o. Panitera Muda Perkara Perdata Kepaniteraan Mahkamah Agung;
  - p. Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Kepaniteraan Mahkamah Agung;
  - q. Panitera Muda Perkara Agama Kepaniteraan Mahkamah Agung;
  - r. Panitera Muda Perkara Militer Kepaniteraan Mahkamah Agung; dan
  - s. Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Kepaniteraan Mahkamah Agung.
- 5) Petugas Layanan Informasi dijabat oleh aparatur Pengadilan yang ditunjuk oleh Atasan PPID.

### **3. Anggaran**

Pelayanan informasi pada meja informasi Mahkamah Agung saat ini memiliki anggaran khusus dengan nama akun "Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Monitoring, dan Evaluasi Meja Informasi Terpadu" dengan nominal sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah).

**C. DATA PELAYANAN INFORMASI**

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum Dikuasai/Selesai	Lainnya
Perkara dan Putusan	1867	20 menit	1867	0	0	0	0	0

**D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI**

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Keberatan	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara dan Putusan	0	0	0	0	0	0	0	0

#### **E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI**

Kendala pada pelayanan meja informasi saat ini adalah informasi perkara yang tersedia pada aplikasi info perkara Mahkamah Agung belum mengakomodasi seluruh informasi yang dibutuhkan oleh para pencari keadilan selama ini.

#### **F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI**

Peningkatan layanan pada meja informasi dengan pelayanan prima petugas meja informasi dalam memberikan informasi hukum dan peradilan sebagai upaya untuk meningkatkan layanan yang diberikan, selain dari informasi yang tersedia dan kemudahan untuk mencari informasi. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan mengembangkan layanan informasi berbasis elektronik serta memberikan *leaflet* tata cara pencarian informasi perkara dan berkoordinasi dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung agar informasi perkara pada *website* Info Perkara Mahkamah Agung *ter-update* sehingga dapat memberikan informasi secara tepat, cepat dan akurat.

Jakarta, 2 Januari 2023  
Pejabat Pengelola Informasi  
dan Dokumentasi (PPID)

(Dr. H. Sobandi, S.H., M.H.)